

CORAK HUMANISME DALAM SERIKAT BURUH JAWA TAHUN 1926-1942

Daya Negri Wijaya

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5 Malang
Dayawijaya15@yahoo.com

Abstract: trade union established as a common goal of workers in obtaining life insurance and mutual prosperity. But in its development, trade unions met various obstacles both in the internal context where there are workers who do not want to join the union or the external context where the union is under pressure from the investors and the government. However, they are not desperate and trying to fight the goal. Furthermore, they struggle in perkembangannya ternyata not only the interests of the union but also the interests of the people in general such as issues of racial and class and gender gaps. This paper is expected to provide a historical consciousness of the reader in order to use the past as suggestions and lessons learned in designing a better future.

Keywords: national movements, labor, human existence, humanism

Abstrak. Serikat buruh terbentuk karena cita-cita bersama buruh dalam memperoleh jaminan hidup dan kesejahteraan bersama. Namun dalam perkembangannya serikat buruh menemui berbagai kendala baik dalam konteks internal dimana ada buruh-buruh yang tidak mau bergabung dengan serikat ataupun konteks eksternal dimana serikat mendapat tekanan dari pihak pemodal serta pemerintah. Walaupun demikian mereka tidak putus asa dan berusaha untuk memperjuangkan tujuannya. Lebih lanjut, perjuangan mereka dalam perkembangannya ternyata bukan hanya memperjuangkan kepentingan serikat tetapi juga kepentingan manusia secara umum seperti permasalahan rasial dan kelas serta kesenjangan gender. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kesadaran historis pada pembaca agar menggunakan masa lalu sebagai saran dan pelajaran dalam merancang masa depan yang lebih baik

Kata-kata Kunci: pergerakan nasional, buruh, eksistensi manusia, humanisme

Dewasa ini masyarakat Indonesia digegerkan oleh beberapa video Tenaga Kerja Wanita (TKW) beserta respon dari para suami yang ditinggal ke luar negeri dan Presiden Jokowi yang merespon melalui pemberian nasehat-nasehat yang diunggah ke situs Youtube. Video tersebut memberikan gambaran bagaimana kehidupan seorang tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ironisnya banyak yang menghabiskan jerih payah tersebut dengan berfoya-foya tanpa mempertimbangkan tabungan hari esok. Selain itu tidak semua tenaga kerja dapat menikmati hasil kerjanya atau tidak digaji. Mereka ada yang disiksa, diperkosa, dicambuk, bahkan tidak diberi makan dan diperlakukan tiada ubahnya seperti budak atau bahkan lebih mirip seperti budak yang dikontrak. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau memperjuangkan hak-hak dasar mereka sebagai manusia (hak untuk hidup,

kebebasan, kepemilikan, dan kesehatan) karena mereka hanya berdiri sendirian.

Pada masa kolonial pasca pemberontakan PKI 1926 dan pendudukan Jepang 1942 muncul dua sentimen yang bernada negatif pada citra pekerja atau buruh Indonesia yang mayoritas berasal dari Jawa, termasuk serikat-serikat buruh Indonesia yang pada dasarnya merupakan serikat-serikat buruh di Jawa (Ingleson, 2015:14). Penyebab buruh diberi upah rendah dan hidup dalam penderitaan adalah: (1) pada 1833, Gubernur Jenderal J. Van den Bosch menulis, “tidak ada yang lebih menyenangkan bagi orang Jawa selain berada dalam posisi bisa bekerja lebih sedikit dibanding yang diharuskan. Ini akibat kondisi iklim mereka (iklim yang dimaksud apakah cuaca atau lingkungan kerja?); dan (2) pandangan umum di kalangan pejabat dan majikan Eropa

adalah buruh-buruh Indonesia pemalas dan tidak memiliki keinginan meningkatkan kehidupan material mereka. Sebagian besar orang Eropa yakin bahwa menaikkan upah hanya akan membuat orang Indonesia makin malas bekerja (Ingleson, 2015:24-25).

Fenomena di atas beserta dua sentimen tersebut memberikan gambaran bahwa tiada seorangpun dapat belajar dari sejarah. Bahkan, adagium Hegel yang sangat terkenal menjelaskan bahwa yang didapat dari belajar sejarah adalah kegagalan dalam memahami dan memaknai sejarah itu sendiri. Mengikuti pola Marx dalam *The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon* terungkap bahwa sejarah memang tidak mungkin berulang kembali karena hanya terjadi satu kali (*einmalig*) tetapi pola yang terjadi di masa lalu bisa saja terulang di masa kini walaupun aktor, tempat, dan waktunya yang berbeda. Lebih lanjut, bagi Marx apabila manusia (buruh) di masa lalu menderita dan sengsara itu adalah tragedi tetapi apabila manusia (buruh) di masa kini mengalami hal yang sama adalah suatu lelucon. Mengapa demikian? Karena mereka gagal belajar dari pengalaman masa lalu; pengalaman masyarakatnya; pengalaman dari perjuangan di masa lalu untuk kesejahteraan masa kini; dan yang terpenting adalah mereka lupa hakikat manusia yang memiliki kesadaran historis.

Bagi Marx, jalan keluar dari ketidakadilan tersebut adalah seluruh buruh atau tenaga kerja (dalam Orde Baru disebut karyawan) harus bersatu. Mengapa demikian? Pada hakikatnya buruh hidup dalam tangan majikan dan mereka mengikuti kehendak majikannya, jarang ditemui buruh yang memiliki lebih dari satu majikan dan yang ada hanyalah majikan yang mempunyai lebih dari satu buruh. Mengikuti pola materialisme dialektika Marx (*it is not consciousness of men that determine their beings, but, on the contrary their social beings determine our consciousness*) dalam sejarah (biasanya disebut pula sebagai materialisme historis), aktivitas manusia dimulai dari kehidupan komunalisme yang hidup dalam dua aktivitas yang bertentangan yakni kehidupan berpindah-berpindah dan kehidupan menetap. Kehidupan komunalisme ini yang kemudian menggiring manusia pada persinggungan dan pertentangan sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang bersifat feodal. Feodalisme dalam perkembangannya menimbulkan dua kelas yang dominan yakni kelas feodal (tuan tanah) dan kelas budak.

Dalam perkembangan ekonomi ternyata hasil pengolahan tanah tidak lagi mencukupi kebutuhan dan menyejahterakan rakyat maka jarum jam beralih pada ekonomi industri dimana para tuan tanah berlomba-lomba untuk menyewakan tanah atau membuat industri di lahan mereka. Dalam situasi inipula banyak budak yang diperjualbelikan dan banyak pula yang melarikan diri. Namun karena tidak mampu mencukupi kebutuhan diri maka mereka harus bekerja, apapun pekerjaan yang didapat. Kondisi ini yang nantinya menciptakan masyarakat kapitalis, bahwa kerabat tuan tanah menjelma menjadi kaum borjuis seperti yang disebut kelas menengah dan kelas bawah adalah transformasi dari budak yang berganti nama menjadi buruh (menjadi alat manusia untuk mengatur metabolismenya dengan alam) tetapi mendapat perlakuan yang sama saja seperti budak (jam kerja yang tidak manusiawi serta wanita dan anak yang dipekerjakan). Para buruh akan tetap tidak mendapatkan keadilan tanpa mereka bersatu untuk berjuang menekan kaum borjuis (majikan). Mereka sudah saatnya sadar bahwa kekuasaan para borjuis atas perekonomian menjadi benteng yang harus segera dihancurkan. Ketika buruh bersatu dan menduduki semua aset serta menyamaratakan properti yang ada maka kesejahteraan akan didapat.

Paralel dengan pendapat Marx, Munir (2014) juga menjelaskan bahwa tanpa solidaritas dan persatuan, berbagai tuntutan buruh akan lemah posisi tawarnya. Bahkan hal itu juga berpotensi menihilkan partisipasi individu-individu buruh untuk bergabung dalam gerakan buruh. Secara pragmatis sesuai dengan tujuan serikat buruh, kekuasaan borjuasi sepenuhnya didasari oleh persaingan antar buruh sendiri seperti misalnya para borjuasi akan mengganti atau memberhentikan buruh yang mogok dan menggantinya dengan buruh yang lain untuk mendapatkan upah yang murah (Engels, 2014:71).

Perjuangan ini setidaknya para buruh harus memiliki suatu kendaraan politik, wadah yang menampung semua aspirasi dan memiliki kesatuan visi, misi, dan cita-cita. Kendaraan tersebut disebut sebagai serikat buruh, organisasi inilah yang kemudian memperjuangkan hampir semua aspirasi dan perlakuan tidak adil pada buruh. Dewasa ini hampir semua perusahaan dan pabrik baik yang berskala nasional dan internasional memiliki serikat buruh ataupun serikat pekerja. Dimana ketika mereka merasa dirugikan atau tidak diberikan haknya, laporan pada serikat akan terjadi dan

serikat mulai bergerak. Ilustrasi kecil ketika saudara penulis bekerja di salah satu klinik PTPN X, setiap pekerja yang berobat dan obatnya dibatasi (tidak diberikan obatnya sesuai dengan perjanjian) maka mereka akan melapor pada SP dan dampaknya SP sebagai pemegang kekuasaan akan menekan pihak direksi dengan demonstrasi atau mogok kerja. Namun biasanya aksi ini seringkali tidak mendapat reaksi nyata dari direksi. Ingleson (2015:2) menjelaskan bahwa upaya pemerolehan hak-hak buruh dengan cara militansi adalah lelucon yang kedua. Pengalaman pada masa kolonial menunjukkan perjuangan para buruh membuahkan hasil apabila mereka memakai cara yang lebih akomodatif ketika menghadapi penguasa yang cenderung represif pasca pemberontakan PKI 1926.

Para buruh dalam pemerolehan hak-hak dasarnya tentunya ingin mendapatkan keadilan bahwa jika perusahaan maju dan berkembang maka kesejahteraan buruh juga ikut naik sebaliknya apabila perusahaan diambang kehancuran maka para buruh harus *legawa* menerimanya. Fenomena ini adalah cerminan dari teori keadilan sebagai *fairness* yang dikembangkan oleh John Rawls. Rawls (2011:13) mengungkapkan bahwa setiap orang harus mempertimbangkan manfaat dari keputusan yang dibuat dengan pemikiran rasional sehingga sekelompok orang harus memutuskan apa yang menurut mereka adil dan tidak adil bagi kepentingan bersama. Dengan mengikuti teori Rawls, seyogyanya para buruh melalui serikat buruh melakukan negosiasi dengan para pemilik modal dan atau didampingi oleh negara sebagai penjamin hak-hak setiap warga negara namun perlu dibuat catatan bahwa mereka harus memperhatikan kewajiban-kewajiban sebagai pekerja. Dalam pertemuan tersebut diharapkan menemukan jalan tengah atau konsensus dari pertentangan kepentingan keduanya sehingga buruh menggapai kesejahteraan dan para kapitalis memperkuat pondasi masyarakat pasar dengan masyarakat bersahabat yang menekankan simpati antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Namun demikian, serikat buruh kini hanya mengejar kesejahteraan buruh atau pekerja sendiri tanpa melihat kepentingan bangsanya dan seolah lupa bahwa buruh pada masa kolonial juga menekankan pada aspek humanisme yang tidak melihat kepentingan buruh, ideologi, rasial, atau kewarganegaraan tetapi melihat tanggung jawab

dan toleransi dalam masyarakat. Kini sudah sewajarnya serikat buruh bukan lagi mementingkan kepentingan buruh ataupun kepentingan bangsanya tetapi juga menggerakkan humanisme untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan dasar yang dihadapi manusia. Tulisan ini akan berusaha membahas lebih dalam tentang perkembangan serikat buruh. Selain itu, akan diulas pula corak humanisme sebagai alternatif *blue-print* dasar perjuangan serikat buruh. Dengan hadirnya tulisan ini diharapkan setiap insan menyadari kebermaknaan sejarah dan percik-percik humanisme didalamnya.

SEKILAS PERKEMBANGAN SERIKAT BURUH

Kini pandangan sejarah telah mengalami pergeseran dari yang bersifat sumber pengetahuan menuju sumber kebermaknaan. Masa lalu akan bermakna atau bermanfaat apabila dimaknai secara baik oleh manusia di masa kini. “Ide masa lalu tak kenal waktu” menjelaskan bahwa konsep masa kini dapat dibawa dengan mudah ke masa lalu (Wineburg, 2006:71). Dengan kata lain, manusia akan lebih mudah memahami apa yang terjadi di masa kini apabila melihat bagaimana peristiwa tersebut terkonstruksi dan secara tidak langsung akan berhubungan dengan masa lalu yang menjadi kajian sejarah. Namun bagaimanapun juga konsep tersebut tetap membawa dampak yang berbeda bagi beberapa orang: (1) ada beberapa orang yang dikategorikan sebagai *divi past* (sebutan dalam Bahasa Inggris bagi orang yang sakit ingatan dan melihat sejarah dengan kekusaran dan penghinaan karena tidak mengerti); (2) melihat sejarah sebagai sistem penjelasan tetapi tidak banyak berusaha memahami masa lalu dari sisi masa lalu itu sendiri; dan (3) melihat perbedaan antara cara berpikir masa lalu dan masa kini atau perubahan *zeitgeist* dan *mentelite* dalam sejarah.

Oleh karena itu dalam menjalankan pembelajaran sejarah sudah sewajarnya mulai mentransformasikan dari cerita tetap pada serangkaian cerita yang mengundang murid untuk merenungkan keutuhan pengalaman manusia. Dengan mempertanyakan masa lalu, murid menerangi masa kini. Kegiatan-kegiatan apa pada masa lalu dan masa sekarang yang patut mendapat perhatian? Kisah siapa dan persoalan apa yang dimasukkan atau tidak? Siapa yang memutuskan? (Wineburg, 2006:197). Soe Hok Gie dalam

skripsinya yang telah dibukukan berjudul “Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan” memberikan penjelasan bahwa sebenarnya sebuah peristiwa dikonstruksi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dalam konteks pemberontakan PKI 1948 tidak terlepas dari keadaan di Jawa pada 1926, Rusia, Belanda, Australia, Cina, serta Digul yang semuanya meninggalkan jejaknya pada tragedi Madiun. Dengan kata lain seluruh peristiwa yang kita bahas bukan cerita utuh sehingga perlu dilihat apa yang mengonstruksi sebuah peristiwa tersebut terjadi.

Mengikuti pola diatas, penulis berusaha menjelaskan perubahan dan kesinambungan serikat buruh Indonesia di masa reformasi dengan memberi penjelasan secara historis yang dimulai dari konstruksi kehidupan buruh dalam pemerintahan otoriter Orde Baru serta warisan buruh pada masa kolonial yang kiranya membentuk ideologi dan praksis serikat buruh kini. Tjandra (2014:790) menunjukkan adanya gerakan buruh yang mencolok dan berbeda dari sebelumnya (orde baru) yakni pembentukan aliansi serikat yang disebut KAJIS (Komite Aksi Jaminan Sosial). Mereka melancarkan demonstrasi disertai dengan kampanye publik langsung melalui media massa yang dimulai 5 April 2010 untuk mendorong parlemen nasional dan daerah merekomendasikan dukungan implementasi reformasi jaminan sosial di Indonesia. Perjuangan KAJIS sebagai aliansi dari serikat-serikat regional dalam mereformasi sistem jaminan sosial (berhasil mengawal lolosnya RUU BPJS 28 Oktober 2011: BPJS I sebagai jaminan kesehatan dan BPJS II pada ketenagakerjaan) menunjukkan kemungkinan mengembangkan persatuan serikat buruh di tingkat nasional yang kiranya telah merubah orientasi dari yang bersifat pasar atau bisnis (masa orde baru) ke arah yang lebih sosial. Hal ini merupakan suatu terobosan setelah dekade panjang penindasan dan kooptasi negara terhadap gerakan serikat buruh pada masa orde baru.

Kehidupan serikat buruh pada masa Orde Baru sungguh memprihatinkan. Buruh memang menempati posisi yang strategis dalam menguatnya industri non-migas, terutama industri manufaktur. Tidak hanya secara ekonomis namun juga secara politis. Dalam rangka memelihara stabilitas sosial dan politik, yang diyakini sebagai prasyarat pokok keberhasilan pembangunan ekonomi, Orde Baru merasa perlu mengadakan pengaturan untuk mengendalikan buruh.

Anggapan ini berasal dari sentimen bahwa serikat buruh menjadi ladang basah munculnya kembali pengaruh unsur-unsur kiri yang menonjol dalam gerakan buruh pada masa 1950-an dan 1960-an yang kiranya menjadi ancaman pokok stabilitas dan keamanan negara. Pengendalian buruh pada masa Orde Baru diartikan tidak membuka kemungkinan bagi munculnya serikat buruh independen serta terjaminnya kepatuhan (faktor yang mendorong munculnya gerakan bawah tanah). Satu-satunya organisasi buruh yang diijinkan pemerintah adalah Federasi Seluruh Buruh Indonesia (FBSI) yang berdiri tanggal 20 Juli 1973 dengan membawahi Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP). Bersamaan dengan itu juga dikeluarkan peraturan yang membatasi kemungkinan terbentuknya organisasi buruh di luar FBSI. Peraturan ini mensyaratkan bahwa sebuah organisasi buruh harus berbentuk gabungan serikat buruh yang membawa 20 daerah dan 15 SBLP. Lebih lanjut konsep hubungan industrial Pancasila antara buruh, pengusaha, dan pemerintah yang seimbang, mawas diri, dan memelihara terus ditekankan dan nampaknya hanya menjadi wacana. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari campur tangan pemerintah yang begitu besar seperti misalnya instruksi Laksamana Sudomo bahwa seluruh kodim harus terlibat dalam sengketa industri dan mencegah pemogokan (Warouw, 2000:3-5).

Hal tersebut terjadi karena pemerintahan Orde Baru sangat bernaftu sekali untuk membangun citra bahwa era-nya lebih baik dari masa sebelumnya. Peristiwa 1966 yang menyulut mesiu bahwa buruh adalah ladang dari ideologi sosialis-komunis sehingga membuat serikat buruh dilarang keras beredar di masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Lama dinilai oleh Orde Baru membuat kebijakan seperti dinamit yang dapat menghabisi pemerintahannya. Orde Lama memberikan kebebasan berserikat dan memberikan kebijakan yang menguntungkan buruh hingga ideologi komunisme masuk. Serikat buruh pada masa Orde Lama sangat kokoh dan kompak bukan tanpa halangan serta bahkan pada awal kemerdekaan masih terpecah-belah. Alimin kemudian menyatukannya dan membentuk SOBSI, disusul kemudian muncul serikat yang lebih radikal yakni GASBRI dan yang lebih moderat yakni POSS (Munir, 2014:12).

Selain itu pasca proklamasi 17 Agustus 1945 yang dirasakan sebagai pembebasan dari

penjajahan dan eksploitasi modal asing yang didukung oleh Pemerintahan Kolonial. Pemerintahan Nasional menjadi unsur penting dalam perjuangan kaum buruh untuk memperbaiki kesejahteraannya. Untuk itu, gerakan buruh dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam pembangunan negara di bawah pemerintahan sendiri. Kaum buruh juga turut serta melancarkan aksi perebutan dan pengambilalihan kantor-kantor perusahaan dan sarana penting yang masih dikuasai oleh Jepang. Mereka yang dapat bebas kemudian mulai melucuti apa yang dimiliki oleh asing mengingat gerakan buruh dan serikat buruh dapat dikendalikan dengan baik oleh pemerintah Kolonial Belanda maupun Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, semua kegiatan organisasi baik politik maupun sosial-ekonomi dilarang (Munir, 2014:11).

Perkembangan buruh seperti yang diuraikan diatas dinilai oleh Ingleson diwarisi oleh pengalaman buruh masa kolonial. Dia melihat bahwa mengapa buruh dapat mendapatkan mimpinya yang salah satunya adalah jaminan sosial karena para pemimpin serikat (Ingleson di buku ini menyebut sarekat) buruh berjuang membangun organisasi-organisasi yang mengabaikan pembagian suku, bahasa, dan kelas sosial tempat-tempat kerja Indonesia. mereka mendapatkan akses yang terbatas. Selain sebagai kendaraan politik dalam meraih kenaikan upah mereka juga menempati posisi penting dalam perkembangan kesadaran politik, menciptakan berbagai kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk memperoleh keterampilan-keterampilan organisasi dan menyediakan saluran bagi banyak orang Indonesia untuk bergabung dalam partai-partai nasionalis (Ingleson, 2013:409). Dengan kata lain, serikat buruh memiliki suatu kecenderungan untuk melebur dan bersatu dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal ini adalah modal penting sekaligus kunci bagi eksistensi serikat buruh yang terus dirongrong oleh kepentingan kapitalis di masa depan.

Humanisme sebagai Alternatif *Blue-Print* Dasar Perjuangan Serikat Buruh

Alternatif *blue-print* dasar perjuangan serikat buruh dapat diretas ketika mereka bersatu pertama kali untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama tersebut dilihat dari visi dan misi serikat buruh di zaman bergerak yang manifestasinya terlihat ketika Indonesia meraih

kemerdekaan. Seringkali dalam perkembangan zaman, orientasi serikat buruh berubah-ubah dan yang terdekat pada masa orde baru lebih ke arah pasar atau bisnis sedangkan masa reformasi ke arah sosial (pada kesejahteraan buruh) tetapi mereka melupakan orientasi luhur yang bersifat humanis bukan saja memperjuangkan hak-haknya tanpa melupakan kewajibannya sebagai seorang pekerja. Buruh dan pekerja atau karyawan sebenarnya memiliki makna yang sama tetapi mengalami penghalusan bahasa. Warouw (2000:10) menjelaskan bahwa Buruh mengandung makna orang yang semata bekerja pada orang lain demi upah tanpa harus terlibat secara rohaniyah atas pekerjaannya. Buruh secara implisit sebagai pelaksana perintah atau sebagai alat dalam memproduksi. Selain itu buruh menyimpan pengertian sebagai suatu kelompok yang berada pada posisi yang berkontradiksi dengan majikan. Orde Baru menggunakan politik penghalusan bahasa dengan menggunakan pekerja atau karyawan yang bermakna memiliki ikatan kerohanian dan kebanggaan profesional yang kuat dengan yang dikerjakan serta terdapat jenjang karir yang dapat diperoleh jika berprestasi.

Pada masa bergerak (kolonial), buruh bukan hanya sebagai anti-tesis pada kaum pemodal tetapi juga sebagai suatu komunitas yang hidup dalam pertentangan bangsa antara Belanda dan (cita-cita) Indonesia. Oleh karena itu, buruh dapat dipahami sebagai orang yang kepunyaan dan tanahnya dirampas oleh kapitalis. Mereka yang dulunya adalah petani dan pedagang kecil, dirampas segala miliknya hingga tersisa tenaga, badan, dan nyawa. Kaum kapitalis tidak memberikan gaji yang layak dan tiada jaminan sosial sehingga para buruh menggeliat dan menuntut perbaikan hidup. Pertentangan sosial ini dipertajam oleh perbedaan bangsa dan pemerintahannya masih dijalankan oleh asing yang cenderung mengabaikan kepentingan pribumi (Malaka, 2013:71-75).

Kondisi pekerja niscaya tidak bahagia dalam kondisi terhisap karena mereka tidak hidup sebagai manusia seperti dipikirkan dan dibayangkan oleh seorang manusia. oleh karena itu, buruh berusaha keluar dari kondisi kejam untuk mencapai hidup yang lebih baik dan lebih manusiawi. Buruh hanya bisa mencapainya dengan menyerang kepentingan borjuasi yang tetap mengeksploitasi mereka. Namun borjuasi mempertahankan kepentingannya dengan segala kekuatan karena kekayaan dan

kekuasaan negara (Engels, 2014:65). Serikat buruh dibentuk dengan tujuan yang jelas yakni melindungi buruh dari tirani dan pengabaian borjuasi. Tujuan serikat buruh sebagai kekuatan politik adalah membuat kesepakatan umum dengan majikan, mengatur tingkat upah rata-rata sesuai laba yang didapatkan majikan, meningkatkan upah jika ada peluang, dan menyamakan upah bagi semua pekerja (Engels, 2014:67-68). Dapat dipahami mengapa buruh berontak, hal ini karena sistem produksi yang tidak manusiawi akan menentukan bahwa buruh sebagai kelompok tertindas yang selalu memberontak (Warouw, 2000:10).

Namun demikian, para buruh bukan hanya di tingkat pimpinannya tetapi juga sampai taraf anggota-anggota biasa melalui serikat buruh memiliki keterkaitan dengan partai-partai politik nasionalis. Hal ini menjadi wajar karena kepentingan buruh dapat terlaksana apabila negara memberikan intervensi pada kaum kapitalis untuk meninjau ulang gaji yang diberikan. Namun apa yang terjadi pada masa kolonial berbeda dengan asumsi tersebut, para pemilik modal akan pergi jika ditekan oleh pemerintah kolonial yang menggantungkan pemasukan dari kaum kapitalis tersebut. Oleh karena syarat utama dalam pemerolehan hak-hak buruh dengan menggapai kemerdekaan maka mereka bergabung dengan partai-partai nasionalis yang menginginkan kemerdekaan. Contohnya adalah serikat buruh Pegawai Pribumi Departemen Pekerjaan Umum cabang Probolinggo di bawah pimpinan Raden Panji Suroso. Dia lulusan sekolah guru di Probolinggo tetapi malah melamar menjadi pegawai di Jawatan Irigasi. Kemudian dia berkembang menjadi pemimpin serikat di sektor publik dan dia menjadi ketua cabang Sarekat Islam Probolinggo (Ingleson, 2015:2).

Suroso seperti pimpinan-pimpinan utama serikat buruh besar seperti Hindromartono dari Batavia atau Djoko Said dari Bandung serta Ruslan Wongsokusumo dari Surabaya berjuang dengan cara yang lebih akomodatif (konfrontasi dilarang keras pemerintah terutama pasca pemberontakan PKI 1926 dan pemogokan massa di kota-kota besar) meliputi tulisan rutin di media massa, menyampaikan pidato-pidato, mengaktifkan organisasi-organisasi kesejahteraan sosial dan koperasi selain juga menjadi anggota partai-partai nasionalis. Ingleson (2015:5) menjelaskan bahwa mereka juga menyadari bahwa tujuan yang diperjuangkan masih bersifat imajiner dan tugas

utama mereka adalah mendidik buruh-buruh Indonesia agar menyadari bahwa serikat buruh adalah bagian dari gerakan internasional yang lebih besar. Mereka yakin bahwa masyarakat sipil yang lebih kuat perlu dibangun dan bahwa pembentukan koperasi penghimpun dana milik serikat, perpustakaan, aktivitas-aktivitas sosial dan pendidikan, klub-klub olahraga adalah langkah penting untuk mencapainya. Pengetahuan mereka mengenai sejarah buruh internasional meyakinkan mereka bahwa serikat buruh hanya bisa mencapai potensi penuh dalam sebuah masyarakat yang demokratis, tapi masyarakat yang demokratis itu tidak dengan sendirinya menjamin upah dan kondisi kerja yang lebih baik bagi kaum buruh. Hanya serikat buruh yang bisa memperjuangkan itu.

Jatuh bangun perjuangan dalam menggapai kemerdekaan dipengaruhi oleh batasan aktivitas oleh negara kolonial yang represif. Setiap terdapat partai politik yang meredup tajinya pasti muncul partai politik yang baru baik sebagai kelanjutan partai yang lama atau gabungan dua partai politik. Setiap partai politik yang ada terus melancarkan propaganda serta menarik para buruh untuk turut serta menyukseskan tujuan partai dan partai berusaha mewujudkan keinginan dari serikat buruh. Hal ini terlihat dari konteks politik pada medio 1926-1942: mulai dari perebutan anggota SI dan PKI hingga Parindra dan Gerindo.

Pasca gagalnya pemberontakan PKI, para anggota termasuk anggota-anggota serikat buruh diinterogasi oleh polisi serta majikannya, sebagian diasingkan ke Boven Digul, dan yang lain dipenjara. Para anggota serikat buruh yang selamat mulai tertarik pada Sarekat Islam yang tidak seberapa lama juga melemah dan tidak mampu bangkit seperti sebelumnya. Memasuki pertengahan 1927, kekosongan politik itu diisi dengan kelahiran Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Kecuali Soekarno yang saat itu menjadi mahasiswa di ITB, para pemimpin PNI sebagian besar adalah para pemuda yang baru kembali studi dari Belanda. Pada puncak kejayaan anggota PNI berjumlah sekitar 10.000 orang. Sebagian besar bekerja sebagai guru sekolah, pegawai negeri, klerik, dan pedagang. PNI-pun akhirnya tidak bertahan lama dengan ditangkapnya pucuk pimpinannya dan partai tersebut dilarang. Setelah PNI dibubarkan muncul Partindo pimpinan Sartono yang kemudian diambil alih oleh Soekarno dan golongan merdeka yang berkembang menjadi PNI-Baru dibawah

Hatta dan Sjahrir. PNI-Baru dan Partindo ini yang kemudian merebut kepemimpinan gerakan kebangsaan. Dengan sifat represif, pemerintah kolonial kemudian juga melarang kedua partai tersebut dan Sutomo, seorang dokter membentuk Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dengan harapan dapat mengisi kekosongan kepemimpinan gerakan kebangsaan. Namun harapan itu tidak tercapai. PBI bersama Budi Utomo melebur menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra). Disisi lain pada medio Mei 1937 lahir partai baru yang lebih radikal bentukan aktivis muda di Batavia yaitu Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Parindra dan Gerindo tetap menghadapi ruang gerak yang sempit di bawah kebijakan pemerintah kolonial (Ingleson, 2015:62-66).

Selain orientasi pragmatis pada kebutuhan ekonomi dan politik, serikat buruh ternyata memiliki corak humanisme yang berusaha menyelesaikan permasalahan dasar manusia. Humanisme secara umum dapat dipahami sebagai pandangan yang berfokus pada jalan keluar dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia. Humanisme terbagi dalam dua spektrum yakni humanisme religi dan humanisme sekular. Humanisme religi biasanya berfokus pada martabat dan budi luhur dari keberhasilan yang dihasilkan oleh manusia seperti Santo Agustinus. Namun pandangan ini tidak bertahan lama akibat kritisi bahwa dogma agama membelenggu nalar manusia. Dengan perantara alam pencerahan Eropa, manusia mulai membangun kesadaran kritis dengan memposisikan dirinya sebagai individu yang berpengaruh pada proses sejarah. Gerakan ini disebut humanisme sekular.

Humanisme sekular percaya bahwa bahwa martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika. Jean Paul Sartre merupakan filosof yang begitu berpengaruh pada pandangan humanisme dewasa ini. Sartre (2002:41-47) memberikan penjelasan bahwa setiap manusia pasti memiliki esensi, memiliki beragam fungsi, dan berdampak bagi orang lain sehingga setiap tindakan manusia memiliki imbas pada orang lain. Oleh karena itu, jika manusia percaya bahwa eksistensi mendahului esensi maka manusia menjadi bertanggung jawab atas hidupnya. Eksistensi mendahului esensi dapat dianalogikan seperti hubungan antara benda dan pembuat benda tersebut. Sebagai contoh jika benda tersebut adalah pisau pemotong kertas dan dikatakan bahwa pisau tersebut adalah esensi yang

memiliki beragam fungsi maka pembuat pisau tersebut adalah eksistensinya karena hanya dia yang mengetahui formula dan kualitas produksi pisau tersebut. Mengikuti alur pola pikir Sartre dapat dilihat bagaimana pondasi pemikiran humanisme dalam serikat buruh yang tentunya apapun yang dipikirkan dan dilakukan pasti berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang setidaknya meliputi permasalahan rasial dan kelas serta kesenjangan gender.

Permasalahan rasial dan pelapisan kelas dalam sebuah organisasi memang menjadi ancaman bukan hanya oleh serikat buruh tetapi oleh semua organisasi karena memang setiap individu berasal dari budaya yang berbeda-beda. Para pemimpin serikat buruh sangat menyadari permasalahan dasar yang menyangkut harkat dan martabat manusia ini. Satu hal yang mungkin mendorong mengapa serikat-serikat buruh Eropa mau menerima pribumi Indonesia sebagai anggota lebih karena mereka mengenyam pendidikan barat dan menempati lapisan menengah dalam tatanan masyarakat. Selain itu mereka juga bekerja bersama dengan orang Indo-Eropa dan orang Eropa seperti serikat buruh kereta api, pegawai pos, serta telepon. Mereka ini tidak mau tahu tentang soal "totok", Indo, atau pribumi. Menariknya, serikat buruh ini juga bersimpati dengan adanya buruh-buruh Indonesia karena juga turut membantu dalam meningkatkan posisi tawar mereka dalam berhadapan dengan pihak majikan. Hal ini yang membuat mereka berusaha dan disisi yang lain berebut untuk merekrut lapisan menengah yang berasal dari pribumi. Namun disisi yang lain mereka juga menyadari mayoritas anggota mereka yakni Indo-Eropa akan semakin gelisah jika suatu saat lapisan menengah Indonesia mengambil pekerjaan mereka (Ingleson, 2015:71).

Kesenjangan gender kiranya juga menjadi isu sepanjang hayat dimana aktivitas kehidupan selalu didominasi laki-laki. Bahkan dalam kepemimpinan serikat buruh didominasi oleh laki-laki. Secara umum tidak dapat disangkal bahwa para pemimpin serikat masih berpandangan konservatif terhadap kedudukan perempuan. Mereka lebih terbiasa menempatkan perempuan sebagai pendamping, pengikut, dan menganggap lebih layak mengurus keluarga dibanding menjadi figur publik. Selain itu diskriminasi juga diberlakukan pemerintah kolonial manakala kebangkrutan mulai nampak, pihak pertama yang diPHK adalah perempuan yang sudah menikah dengan alasan melindungi pegawai laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga. Namun

demikian, serikat buruh ternyata tidak mengasingkan perempuan tetapi malah memberdayakannya dalam peran sosial dan ekonomi (yang sebenarnya menjadi tujuan utama serikat buruh). Pada 1930-an serikat-serikat itu mengorganisir unit tambahan untuk perempuan, seperti yang dilakukan serikat pegawai pegadaian, kantor pos, guru, dan pegawai negeri kolonial. Mereka diberi kewenangan dalam mengorganisir koperasi, perpustakaan, dan yang terpenting membantu menciptakan industri rumah tangga kecil atau yang berskala besar seperti Wanita Utomo di Mataram yang merupakan unit perempuan serikat buruh pegadaian berhasil membangun pabrik tekstik pada pertengahan 1930-an (Ingleson, 2015:76-79).

Dapat dijadikan kesimpulan bahwa serikat buruh tidak hanya bergerak dalam tataran pragmatis dalam aspek ekonomi dan politik tetapi lebih jauh dalam tataran humanis yang turut serta menyelesaikan permasalahan dasar manusia dalam permasalahan rasial dan kelas serta kesenjangan gender.

SIMPULAN

Kondisi buruh dan serikat buruh pada masa kolonial memang dapat dipandang sebagai cita-cita kesejahteraan yang ideal bagi mereka di masa

depan. Namun cita-cita ini berarti sudah tergapai dalam alam republik. Bahkan kondisi guru (terutama guru tidak tetap dan honorer) tidak mengalami perubahan mulai dari masa kolonial hingga masa kontemporer yang berpenghasilan jauh dari upah minimal yang telah ditetapkan di masing-masing daerah. Jika dahulu serikat guru berjuang tetapi di masa kini PGRI seolah tidak mau tahu pada nasib guru sebagai profesi tersebut. Contoh lain sebelum pemerintah kolonial menghapus beasiswa bagi pribumi yang ingin studi ke Negeri Belanda, banyak orang yang berduyunduyun mendapatkannya. Namun ketika republik sudah merdeka dan pemerintah memberikan banyak beasiswa ke luar negeri, tidak banyak yang mau mengaksesnya, sungguh ironis dan konyol. Sesungguhnya di era dewasa ini begitu banyak lelucon yang nampak akibat ketidakmauan belajar dari sejarah. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa sejarah tidak penting dan tidak menjual atau tidak menarik untuk dikaji. Sentimen tersebut adalah sentimen yang keluar dari manusia yang tidak tahu hakikatnya sebagai manusia. Dia tidak menyadari bahwa pandangannya pada sejarah tersebut adalah akumulasi pengetahuan yang bersumber dari masa lalu dan sejarah adalah disiplin ilmu yang berusaha mengaji serta merekonstruksi masa lalu.

DAFTAR RUJUKAN

- Engels, Fridrich. 2014. *Kondisi Kelas Pekerja Inggris: Embrio Sosialisme Ilmiah*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2014
- Gie, Soe Hok. 2005. *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta: Bentang.
- Ingleson, John. 2015 *Buruh, Serikat, dan Politik: Indonesia pada 1920-an-1930-an*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Ingleson, John. 2013. *Perkotaan, Masalah Sosial, dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Malaka, Tan. 2013. *Aksi Massa*. Yogyakarta: Narasi.
- Marx, Karl. 2006. *Brumaire XVIII Louis Bonaparte*. Jakarta: Hasta Mitra, 2006
- Munir. 2014. *Gerakan Perlawanan Buruh: Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*. Malang: Intrans Publishing dan Omah Munir.
- Ralws, John. 2011. *Teori Keadilan: Dasar Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sartre, Jean Paul. 2002. *Eksistensialisme dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tedjasukmana, Iskandar. 2008. *Watak Politik Gerakan Buruh Indonesia*. Jakarta: TURC,
- Tjandra, Surya. 2014. *Gerakan Serikat Buruh Indonesia Pasca Orde Baru*. Dalam AE Priyono dan Usman Hamid (Eds.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Public Virtue Indonesia, dan TIFA.
- Warouw, J. Nicolaas. 2000. *Pemogokan Buruh: Perjuangan Kaum Buruh pada Masa Orde Baru*. Yogyakarta: KesAnt.
- Wineburg, Sam. 2006. *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006